



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.15, No.1, Juni 2018

TURBULENSI KEPEMIMPINAN DAN KONEKTIVITAS ANTAR NEGARA

- Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un
- Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016
- Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia:
Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas
- Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia
- Dinamika Kerja Sama Sub-Regional di Selat Malaka:
City to City Connectivity sebagai Pendukung Koridor Ekonomi

RESUME PENELITIAN

- Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik
- Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab

REVIEW BUKU

- Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 15	No. 1	Hlm. 1-127	Jakarta, Juni 2018	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)
Ratna Shofi Inayati, MBA (*ASEAN dan politik luar negeri*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Yusuf Maulana, SAP

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol. 15, No. 1, Juni 2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un Indriana Kartini	1–13
• Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016 Meutya Viada Hafid	15–30
• Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia: Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas Arif Novianto, dkk	31–48
• Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia Siswanto	49–63
• Dinamika Kerja Sama Sub-Regional di Selat Malaka: <i>City to City Connectivity</i> sebagai Pendukung Koridor Ekonomi Awani Irewati	65–80
Resume Penelitian	
• Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik Nyimas Latifah Letty Aziz, dkk	81–96
• Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab M. Fakhry Ghafur, dkk	97–113
Review Buku	
• Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen Defbry Margiansyah	115–125
Tentang Penulis	127–128
Pedoman Penulisan	129–133

CATATAN REDAKSI

Kepemimpinan politik mengalami dinamika menyesuaikan kondisi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada. Tak pelak kondisi tersebut menimbulkan konsolidasi di tingkat kepemimpinan maupun justru sebaliknya menimbulkan turbulensi. Meski demikian, konsensus merupakan upaya yang mesti dilakukan dalam menjaga stabilitas nasional maupun hubungan antar negara.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan kepemimpinan. Artikel pertama yang ditulis oleh Indriana Kartini berjudul "DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA DI ERA MOON JAE-IN DAN KIM JONG-UN", menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjian Panmunjom.

Artikel berikutnya, "KONSENSUS POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARTAI GOLKAR TAHUN 2014-2016". Artikel yang ditulis oleh Meutya Viada Hafid ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016.

Sementara itu, artikel "DINAMIKA GERAKAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF PARTAI PELOPOR DAN PARTAI KIRI LUAS" yang ditulis oleh Arif Novianto, dkk mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme.

Turbulensi kepemimpinan di Amerika Serikat juga dibahas dalam artikel "KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP DAN TURBULENSI TATANAN DUNIA" yang ditulis oleh Siswanto. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan-kebijakan yang ditempuh Amerika selama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bersifat kontroversi sehingga mendorong kepada terjadi turbulensi kepemimpinan dunia. Kebijakan membela kepentingan nasional (*America First*) mengarah kepada proteksionis dan kebijakan membangun kembali Amerika (*make America great again*) mendorong kepada ketegangan diplomatik. Selain itu, tulisan ini juga membahas konsekuensi arah kebijakan kontroversi terhadap terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia khususnya di Timur Tengah dan Asia. Hasil dari kajian ini berupa kesimpulan yang dirumuskan bahwa kepribadian in-konsisten yang ada pada diri Presiden Trump adalah stimulus atas kebijakan kontroversi dan kebijakan kontroversi ini menjadi pemicu terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia.

Artikel terakhir membahas tentang "DINAMIKA KERJA SAMA SUB-REGIONAL DI SELAT MALAKA: CITY TO CITY CONNECTIVITY SEBAGAI PENDUKUNG KORIDOR EKONOMI" yang ditulis oleh

Awani Irewati. Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia *city to city connectivity* menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan *city to city connectivity* bagi Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, *city to city connectivity* yang dimaksud menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional IMT-GT di masa depan.

Selain kelima artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2016. Naskah pertama ditulis oleh M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, dan Nostalgawan Wahyudi, “PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI ARAB SAUDI, KUWAIT, DAN UNI EMIRAT ARAB”. Tulisan ini mengulas berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki mendapat perlawanan dari kelompok oposisi. Terbentuknya kelompok ICM yang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik Ikhwanul Muslimin dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi ICM untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas

dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif.

Naskah kedua, “POLA PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN ISTIMEWA: PERSPEKTIF POLITIK”, ditulis oleh Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, dan Yusuf Maulana. Tulisan ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa dilihat dari perspektif politik. Terdapat tiga daerah yang dikaji yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Adam Bower “NORMS WITHOUT THE GREAT POWERS: INTERNATIONAL LAW AND CHANGING SOCIAL STANDARDS IN WORLD POLITICS”. *Review* yang ditulis Defbry Margiansyah menelaah tentang institusi internasional dan aturan-aturannya dekade belakangan dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku Norms Without Great Powers memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang independen di tengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial” hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana

dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis di atas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisis buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “non-great powers.”

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai kepemimpinan maupun konektivitas antar negara. Selamat membaca.

Redaksi

Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol. 15, No. 1, Juni 2018

DDC: 327.519305194

Indriana Kartini

DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA DI ERA MOON JAE-IN DAN KIM JONG-UN

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 1-13

Deklarasi Panmunjom yang ditandatangani oleh dua pemimpin Korea, Moon Jae-in dari Korea Selatan dan Kim Jong-un dari Korea Utara menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjian Panmunjom. Berdasarkan analisis melalui pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa persamaan antara Pertemuan Tingkat Tinggi Panmunjom dengan Pertemuan Tingkat Tinggi sebelumnya di tahun 2000 dan 2007, namun yang perlu digarisbawahi adalah kenyataan bahwa kedua negara Korea masih memiliki keinginan untuk menciptakan rezim perdamaian. Meskipun dalam mewujudkan hal tersebut masih diperlukan keterlibatan dua negara sekutu masing-masing negara Korea, yakni AS dan Cina.

Kata kunci: Deklarasi Panmunjom, perdamaian Korea, Korea Selatan, Korea Utara, Moon Jae-in, Kim Jog-un

DDC: 324.2598

Meutya Viada Hafid

KONSENSUS POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARTAI GOLKAR TAHUN 2014-2016

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 15-30

Kajian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub menyepakati berbagai hal diantaranya, keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Konsensus politik Partai Golkar tahun 2016 juga dilakukan melalui perantara. Perantara dalam konsensus politik Partai Golkar adalah Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan. Mereka bertindak bukan hanya sebagai wakil pemerintah tetapi juga sebagai petinggi Partai Golkar. Pimpinan Partai Golkar yang baru juga melakukan perubahan di Fraksi Golkar DPR RI, tetapi perubahan tersebut tidak seperti sebelumnya dimana pihak yang kalah disingkirkan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI

diisi oleh Setya Novanto (yang berasal dari kubu Aburizal Bakrie) dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita (yang berasal dari kubu Agung Laksono). Sedangkan DPD tingkat I dan tingkat II yang terdampak konflik dari Pusat, juga ditata ulang oleh pimpinan Partai Golkar yang baru. Pada setiap DPD tingkat I dan tingkat II dilakukan musyawarah untuk memilih pimpinan DPD Partai Golkar dalam rangka menyatukan dua kepengurusan di daerah. Sedangkan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, masing-masing diberikan posisi pada kepengurusan Partai Golkar. Aburizal Bakrie diberikan posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang terakhir muncul pada masa Orde Baru, sedangkan Agung Laksono diberikan posisi Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.

Kata kunci: Partai Golkar, Konsensus Politik, Partai Politik, Indonesia.

DDC: 324.23

Arif Novianto, Lukman Kurniawan dan Samodra Wibawa

DINAMIKA GERAKAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF PARTAI PELOPOR DAN PARTAI KIRI LUAS

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 31-48

Dalam tradisi marxisme melihat gerakan sosial dan perubahan sosial tidak bisa dipisahkan dari pertentangan kelas dan peran organisasi atau partai. Perkembangan Marxisme sekarang ini memunculkan pertentangan dalam tradisi partai politik, yaitu antara partai dengan tendensi politik kepeloporan dan partai bertendensi kiri luas. Kedua tendensi tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing sesuai ruang dan waktu tertentu. Dalam tulisan penelitian ini berupaya mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme. Tulisan ini berupaya membongkar basis material dibalik perubahan tendensi politik tersebut.

Berubahnya tendensi politik juga mengkondisikan perubahan dalam strategi menentang kapitalisme dan perubahan taktik bagaimana menciptakan tanggapan menuju sosialisme yang mencoba dianalisa dalam tulisan ini.

Kata kunci: Marxisme, Partai Rakyat Demokratik, Partai Pelopor, Partai Kiri Luas

DDC: 321.804273

Siswanto

KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP DAN TURBULENSI TATANAN DUNIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 49-63

Latar belakang penulisan artikel ini didasari oleh pertimbangan bahwa kebijakan-kebijakan yang ditempuh Amerika selama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bersifat kontroversi sehingga mendorong kepada terjadi turbulensi kepemimpinan dunia. Selanjutnya masalah yang didiskusikan dalam tulisan ini adalah kepribadian inkonsisten Presiden Donald Trump yang berpengaruh kepada lahirnya kebijakan-kebijakan kontroversi. Kebijakan membela kepentingan nasional (America First) mengarah kepada proteksionis dan kebijakan membangun kembali Amerika (make America great again) mendorong kepada ketegangan diplomatik. Selain itu, tulisan ini juga membahas konsekuensi arah kebijakan kontroversi terhadap terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia khususnya di Timur Tengah dan Asia. Hasil dari kajian ini berupa kesimpulan yang dirumuskan bahwa kepribadian inkonsisten yang ada pada diri Presiden Trump adalah stimulus atas kebijakan kontroversi dan kebijakan kontroversi ini menjadi pemicu terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia.

Kata kunci: kontroversi, turbulensi, kebijakan Amerika, Presiden Trump

DDC: 327.15951

Awani Irewati

DINAMIKA KERJA SAMA SUB-REGIONAL DI SELAT MALAKA: CITY TO CITY CONNECTIVITY SEBAGAI PENDUKUNG KORIDOR EKONOMI

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 65-80

Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia *city to city connectivity* menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan *city to city connectivity* bagi Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, *city to city connectivity* yang dimaksud menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional IMT-GT di masa depan.

Kata kunci: kerja sama subregional, *city to city connectivity*, koridor ekonomi, Selat Malaka

DDC: 320.95380536705357

Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, Yusuf Maulana

RESUME PENELITIAN
POLA PENGAWASAN
PENGELOLAAN DANA OTONOMI
KHUSUS DAN ISTIMEWA:
PERSPEKTIF POLITIK

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 81-96

Studi ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa dilihat dari perspektif politik. Terdapat tiga daerah yang dikaji yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan

antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, studi ini membuktikan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa. Metode penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan dokumen pendukung, wawancara mendalam, dan diskusi terbatas.

Kata kunci: pengawasan, dana otsus/istimewa, perspektif politik.

DDC: 352.14

M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Nostalgawan Wahyudi

RESUME PENELITIAN
PROBLEMATIKA KEKUATAN
POLITIK ISLAM DI ARAB SAUDI,
KUWAIT, DAN UNI EMIRAT ARAB

Jurnal Penelitian Politik
Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 97-113

Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki mendapat perlawanan dari kelompok oposisi. Terbentuknya kelompok ICM yang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik Ikhwanul Muslimin dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi ICM untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif. Berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab akan menjadi fokus kajian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis, yang diperkaya dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk memperoleh pendalaman,

penelitian ini diawali dengan penelusuran data-data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Di antaranya melalui berbagai literatur, jurnal, media elektronik dan cetak, juga media internet yang memberikan informasi penting yang dapat membantu mengidentifikasi sekaligus memetakan permasalahan yang dikaji. Untuk menghasilkan analisis yang tajam dan akurat, dilakukan penelitian lapangan di Arab Saudi (Jeddah, Mekkah dan Madinah) melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan para pakar, akademisi di beberapa universitas, dan tokoh yang terkait dengan pokok kajian.

Kata kunci: Politik Islam, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab

DDC: 341

Defbry Margiansyah

REVIEW BUKU

KEKUATAN SOSIAL HUKUM: MENUNDUKKAN NEGARA KEKUATAN BESAR MELALUI INSTITUSI MULTILATERAL INDEPENDEN

Jurnal Penelitian Politik

Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 115-125

Dalam beberapa dekade, institusi internasional dan aturan-aturannya dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku *Norms Without Great Powers* memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang independen di tengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial” hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi

tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis di atas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisis buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “non-great powers.”

Kata kunci: Multilateralisme, hukum internasional, norma, kekuasaan politik, Mahkamah Pidana Internasional, Traktat Larangan Ranjau.

DDC: 327.519305194

Indriana Kartini

**PANMUNJOM DECLARATION AND
KOREAN PEACE PROSPECTS IN
MOON JAE-IN AND KIM JONG-UN
ERA**

Journal of Political Research

Vol.15, No.1, June 2018, Page 1-13

The Panmunjom Declaration signed by two Korean leaders, Moon Jae-in from South Korea and Kim Jong-un from North Korea marked a new era in peace on the Korean Peninsula. Although skepticism about positive implications has emerged both domestically and internationally, the commitment of the two Koreas to end the war should be appreciated by the international community. This paper analyzes how the Panmunjom Declaration influences regional and international security as well as the prospects for Korean peace and unification after the Panmunjom agreement. Based on the analysis through a qualitative approach, it can be concluded that although there were some similarities between the Panmunjom High Level Meeting and the previous High Level Meetings in 2000 and 2007, what needs to be underlined is the fact that the two Korean countries still have the desire to create a peace regime. Although in realizing this, the involvement of two allied countries in Korea, namely the US and China, is still needed.

Keywords: Panmunjom Declaration, Korean peace, South Korea, North Korea, Moon Jae-in, Kim Jong-un

DDC: 324.2598

Meutya Viada Hafid

**POLITICAL CONSENSUS ON
GOLKAR PARTY CONFLICT IN
2014-2016**

Journal of Political Research

Vol.15, No.1, June 2018, Page 15-30

This study discusses the phenomenon of political consensus of Golongan Karya (Golkar) Party after internal conflict in 2014-2016. The Golkar Party consensus is a new phenomenon, because the previous Golkar Party conflict has always brought new parties. The results of the study showed that the Golkar Party consensus occurred in the three stages. First stages through the organization's channels, namely the Golkar Party Court, the second through legal channels, the third through the political channels. The political channels shown in Silatnas, Rapimnas, and finally Munaslub Golkar Party in May 2016. Munaslub agreed on various matters, including (1) the decision to set Setya Novanto as Golkar Party Chairman, (2) the establishment of the Golkar Party Trusteeship Council, and (3) the change of Golkar Party's position to the supporting party of Joko Widodo-Jusuf Kalla's government. The political consensus of Golkar Party in 2016 was also conducted through intermediaries. The intermediaries in the political consensus of Golkar Party are Jusuf Kalla and Luhut Panjaitan acting as government representatives and also as Golkar Party officials. The new Golkar Party Leaders also made changes in the Golkar faction of the House of Representatives. Unlike before where the losing faction was removed, the Chairman of the Golkar Party Faction was filled by Setya Novanto (from

Aburizal Bakrie faction) and Secretary of Golkar Party Faction filled by Agus Gumiwang Kartasasmita (from Agung Laksono faction). While the Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I and II are affected by the conflict at the Center, also reorganized by leaders of the new Golkar Party. In each DPD I and II, participatory discussion was conducted to elect the leaders of the Golkar Party DPD, in purpose to unify the two stewardship in the region. As for Aburizal Bakrie and Agung Laksono, each given a position on the management of the Golkar Party. Aburizal Bakrie was given the position as Chairman of the Advisory Council of Golkar Party which last appeared during the New Order; while Agung Laksono was given the position of Chairman of the Golkar Party Expert Council.

Keywords: Golkar Party, Political Consensus, Political Party, Indonesia

DDC: 324.23

Arif Novianto, Lukman Kurniawan and Samodra Wibawa

DYNAMICS OF DEMOCRATIC PEOPLE PARTY (PRD) MOVEMENTS IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF REVOLUTIONARY PARTY AND BROAD-LEFT PARTY PERSPECTIVES

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 31-48

Within a Marxist tradition, social movements and social changes cannot be viewed as separated from the class contradictions and struggles as well as the roles played by mass organisations or parties. The current development of Marxism resulted in the emergence of two polar traditions in political parties, between those with a vanguardist or revolutionary leanings and those of social-democratic or broad-left leanings. These two tendencies have their own advantages and drawbacks depending on the circumstances in which they operated. This study attempts to elaborate the movement dynamics of People's Democratic Party (PRD) in their efforts to achieve the ideals of socialism which they championed. I divided the history of PRD into two different periods, between the New Order period in which they maintained a revolutionary-vanguard tendency and the post-Reformasi period in which there is a shift towards social-democratic tendency that emphasised Soekarnoist ideology. This study also tries to uncover the material basis behind such

changes. Analysing these changes is crucial because the shift in tendency influenced the changes in the strategies to oppose capitalism and the tactics to establish the various steps towards socialism.

Keywords: Marxism, People's Democratic Party, Revolutionary Party, Broad-Left Party

DDC: 321.804273

Siswanto

LEADERSHIP OF DONALD TRUMP AND TURBULENCE OF WORLD ORDER

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 49-63

The background of this article is based on the consideration that the policy pursued by America under the leadership of President Donald Trump is controversial, leading to a turbulence of world leadership. Furthermore the issue discussed in this paper is the in-consistent personality of President Donald Trump who encourages of controversial policies. The policy of protecting on national interest (America First) leads to protectionism and America's rebuilding policy (make America great again) encourages diplomatic tension. Apart from that, this paper also discusses the consequences of controversial policy direction towards world leadership turbulence especially in Middle East and Asia. The result of this study is a conclusion formulated that the in-consistent personality that existed in President Trump is a stimulus to the controversial policy and the controversial policy becomes the trigger for the world's leadership turbulence. Finally the recommendation of this paper is be careful in relations with America under President Trump.

Keywords: controversy, turbulence, American policy, President of Trump

DDC: 327.15951

Awani Irewati

DYNAMIC OF SUB-REGIONAL COOPERATION IN MALACCA STRAITS: CITY TO CITY CONNECTIVITY AS A SUPPORTING ECONOMIC CORRIDOR

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 65-80

Connectivity is one of the important factors in building a cooperation at bilateral, regional and international levels. City to city connectivity realm becomes the backbone in an economic corridor of a subregional cooperation like IMT-GT. This article presents a review of the dynamics of the two economic corridors, namely Medan–Penang Island connectivity and Dumai–Melaka connectivity at the Straits of Malacca, and a little review of the future of city to city connectivity for Indonesia and Malaysia. The writing method of this article is based on qualitative analysis, with the essence of the findings are that as the smallest node in connectivity realm, these two connectivities determine the dynamics of the economic corridors between Indonesia and Malaysia. And this condition will remain as an determining factor for the sustainable cooperation between the two countries, and for subregional cooperation of the IMT-GT in the future.

Keywords: subregional cooperation, city to city connectivity, economic corridor, the straits of Malacca

DDC: 320.95380536705357

Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, Yusuf Maulana

SUMMARY RESEARCH
THE CONTROL PATTERN OF
SPECIAL FUND MANAGEMENT:
POLITICAL PERSPECTIVE

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 81-96

This study examines the special fund management control patterns from a political perspective. There are three areas studied namely, Aceh, Papua, and Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). These three areas are important to be learned since they have specialization and privileges in fiscal management, particularly special fund management. However, central government oversight of special fund management is weak. This is evidenced by the lack of supervision in terms of synergy, coordination, supervision, and supervision between levels of government (province/district). As a result, special fund management does not have a significant impact on improving democratic and harmonious governance through vertical (central-local) or

horizontal (local-local) relationships and improving the welfare of local communities. Therefore, this study proves the importance of monitoring to special fund management. The research methods are conducted through collecting supporting documents, in-depth interviews, and focus group discussion.

Keywords: controlling, special fund, a political perspective

DDC: 352.14

M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Nostalgawan Wahyudi

SUMMARY RESEARCH
PROBLEMS OF THE POWER OF
POLITICAL ISLAM IN SAUDI
ARABIA, KUWAIT AND UNI EMIRAT
ARAB

Journal of Political Research
Vol.15, No.1, June 2018, Page 97-113

Political Islam has a significant influence for a political dynamics in Saudi Arabia, Kuwait and United Arab Emirates. The Gulf War in 1991 has become catalyst for changes of monarchy policy, both internal and external. In Saudi Arabia the Islamist movement and their anti-liberal supporters took place during and after the war, which demanded change. While in Kuwait, the monarchy moves the opposition group. The formation of opposition Islamic Constitutional Movement (ICM) group against the government has attracted Muslim Brotherhood (IM) in a political conflict for reform. This is a challenge for ICM to gain wider political influence in the political constellation in Kuwait. While in the United Arab Emirates, the government claim the opposition as a threat for national security. The various of political Islam activities in Saudi Arabia, Kuwait and the United Arab Emirates will be the focus of the research. The Research methods in this study used a qualitative methodology through deskriptive-analytical approach, fortified with the study literature and the fieldworks. To obtain deepening, this research begins by the searching of primary and secondary data through literature study. Among them through a various literature, journals, electronic media, well as the internet that provide important information for analysis and identify of map the Issues. To produce a sharp and accurate analysis, the studies the field research was conducted in Saudi Arabia (Jeddah, Mecca and Medina) through indepth interviews with experts,

academics at several universities and figures related with the subject matter.

Keywords: Political Islam, Saudi Arabia, Kuwait, and United Arab Emirates

DDC: 341

Defbry Margiansyah

BOOK REVIEW

THE SOCIAL POWER OF LAW: TAMING GREAT POWERS THROUGH INDEPENDENT MULTILATERAL INSTITUTIONS

Journal of Political Research

Vol.15, No.1, June 2018, Page 115-125

For last decade, international institutions along with their rules have been perceived merely as an instrument for maintaining influences and interests of great power countries. However, Norms Without Great Powers offers novel theoretical account regarding the prospect for independent international institutions in the times of great powers ambivalence, such as United States, through the effects of “nested” social structure of international law. This research shows how social dimension of normative

international law shapes and restricts the behavior and expectation of the states in the conduct of international relations. The theoretical postulation drew on constructivist approach applied on empirical inquiry of of the Mine Ban Treaty and Rome Statute of International Criminal Court’s comparative case study. This article aims to highlight and review the book’s analysis critically. To this end, the critical review begins by elucidating main arguments, then providing presentation on main points of respective case studies. Finally theory-guided evaluation and its consequences on problems founds in the case of international law’s implementation promoted by “non-great power” multilateral institution will come up prior to concluding remarks.

Keywords: Multilateralism, international law, norms, power politics, ICC, MBT

KONSENSUS POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARTAI GOLKAR TAHUN 2014-2016

POLITICAL CONSENSUS ON GOLKAR PARTY CONFLICT IN 2014-2016

Meutya Viada Hafid ¹

Universitas Indonesia – Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik
Email: meutyahafidinfo@gmail.com

Diterima: 9 April 2018; direvisi: 23 Mei 2018; disetujui: 26 Juni 2018

Abstract

This study discusses the phenomenon of political consensus of Golongan Karya (Golkar) Party after internal conflict in 2014-2016. The Golkar Party consensus is a new phenomenon, because the previous Golkar Party conflict has always brought new parties. The results of the study showed that the Golkar Party consensus occurred in the three stages. First stages through the organization's channels, namely the Golkar Party Court, the second through legal channels, the third through the political channels. The political channels shown in Silatnas, Rapimnas, and finally Munaslub Golkar Party in May 2016. Munaslub agreed on various matters, including (1) the decision to set Setya Novanto as Golkar Party Chairman, (2) the establishment of the Golkar Party Trusteeship Council, and (3) the change of Golkar Party's position to the supporting party of Joko Widodo-Jusuf Kalla's government. The political consensus of Golkar Party in 2016 was also conducted through intermediaries. The intermediaries in the political consensus of Golkar Party are Jusuf Kalla and Luhut Panjaitan acting as government representatives and also as Golkar Party officials. The new Golkar Party Leaders also made changes in the Golkar faction of the House of Representatives. Unlike before where the losing faction was removed, the Chairman of the Golkar Party Faction was filled by Setya Novanto (from Aburizal Bakrie faction) and Secretary of Golkar Party Faction filled by Agus Gumiwang Kartasasmita (from Agung Laksono faction). While the Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I and II are affected by the conflict at the Center, also reorganized by leaders of the new Golkar Party. In each DPD I and II, participatory discussion was conducted to elect the leaders of the Golkar Party DPD, in purpose to unify the two stewardship in the region. As for Aburizal Bakrie and Agung Laksono, each given a position on the management of the Golkar Party. Aburizal Bakrie was given the position as Chairman of the Advisory Council of Golkar Party which last appeared during the New Order, while Agung Laksono was given the position of Chairman of the Golkar Party Expert Council.

Keywords : Golkar Party, Political Consensus, Political Party, Indonesia

Abstrak

Kajian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub menyepakati berbagai hal diantaranya, keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Konsensus politik Partai Golkar tahun 2016 juga dilakukan melalui perantara. Perantara dalam konsensus politik Partai Golkar adalah Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan. Mereka bertindak bukan hanya sebagai wakil pemerintah tetapi juga sebagai petinggi Partai Golkar. Pimpinan Partai Golkar yang baru juga melakukan perubahan di Fraksi Golkar DPR RI,

¹ Meutya Viada Hafid adalah Wakil Ketua Komisi I DPR RI Periode 2014-2019 dan Ketua DPP Partai Golkar Periode 2017-2019. Penulis dapat dihubungi melalui email : meutyahafidinfo@gmail.com

tetapi perubahan tersebut tidak seperti sebelumnya dimana pihak yang kalah disingkirkan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI diisi oleh Setya Novanto (yang berasal dari kubu Aburizal Bakrie) dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita (yang berasal dari kubu Agung Laksono). Sedangkan DPD tingkat I dan tingkat II yang terdampak konflik dari Pusat, juga ditata ulang oleh pimpinan Partai Golkar yang baru. Pada setiap DPD tingkat I dan tingkat II dilakukan musyawarah untuk memilih pimpinan DPD Partai Golkar dalam rangka menyatukan dua kepengurusan di daerah. Sedangkan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, masing-masing diberikan posisi pada kepengurusan Partai Golkar. Aburizal Bakrie diberikan posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang terakhir muncul pada masa Orde Baru, sedangkan Agung Laksono diberikan posisi Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.

Kata kunci : Partai Golkar, Konsensus Politik, Partai Politik, Indonesia.

Pendahuluan

Pada Tahun 1911, Sosiolog Robert Mitchel, dalam bukunya *Political Parties* memuat mengenai “*The Iron Law of Oligarchy*”. Dengan mempelajari Partai Sosial Demokrat Jerman pada abad 20-an, Mitchel mengklaim bahwa seluruh partai dengan derajat kompleksitas tertentu akan tersentralisasi dibawah sekelompok kecil pemimpin. Sebutan yang terkenal dari Mitchel yaitu: “*Who says, organization, says oligarchy.*”²

Kondisi inilah yang terjadi pada partai Golongan Karya (Golkar) antara tahun 2014 hingga tahun 2016. Selama lebih dari tiga tahun, konflik yang terjadi antara beberapa kelompok di Partai Golkar tidak hanya membuat partai lemah, tetapi juga berdampak pada perpolitikan skala nasional.

Menurut Zulkifli Hamid dan Toto Pribadi, perpecahan dalam parpol bisa disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya perbedaan ideologi dari para anggotanya, perbedaan pelaksanaan kebijaksanaan, dan persaingan terkait kepemimpinan dalam partai. Sedangkan menurut Anton Djawamaku, beberapa macam konflik internal dalam tubuh partai politik terjadi karena partai tidak memiliki *platform* yang jelas, sehingga tidak ada ikatan ideologis yang kuat diantara kader partai. Adanya faktor kepemimpinan tunggal serta manajemen yang buruk juga akan memicu konflik internal.³

Konflik yang terjadi di Partai Golkar telah dimulai semenjak jatuhnya pemerintahan

Soeharto pada tahun 1998. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasan Saeful Rijal dan Wawan Ichwanudin pada tahun 2009 menunjukkan semenjak hilangnya sosok sentral Soeharto, Partai Golkar kehilangan figur kunci yang kemudian melahirkan persaingan di antara tokoh-tokoh internal Partai Golkar. Persaingan yang terjadi adalah dalam rangka merebut kursi ketua umum dan menjadi tokoh utama pada Partai Golkar. Kekalahan salah satu elit dalam perebutan kursi Partai Golkar pada akhirnya memunculkan partai politik baru. Beberapa partai pecahan Partai Golkar akibat konflik antara lain Partai Nasdem, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hanura, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dan Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).⁴

Konflik antar elit Partai Golkar kembali terjadi tahun 2014-2016. Konflik ini pada satu titik hampir membuat partai terpecah bahkan bubar, yaitu ketika terjadinya Musyawarah Nasional (Munas) Tandingan dan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Tandingan di dalam tubuh Partai Golkar oleh kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie. Kubu Agung Laksono menyelenggarakan Munas di Ancol, Jakarta, pada tanggal 6-8 Desember 2014. Sementara kubu Aburizal Bakrie pada 30 November sampai 2 Desember 2014 juga melangsungkan Munas di Bali. Masing-masing Munas menghasilkan

² Oliver Hellmann, *Political Party Organisation in East Asia: Towards a new Framework for the Analysis of Party Formation and Change*, Tesis, (Birmingham: The University of Birmingham, 2009), hlm. 18.

³ *Ibid*, hlm. 18.

⁴ Muhammad Hasan Saeful Rijal dan Wawan Ichwanuddin, “Dinamika Politik Internal Partai Golkar pada Masa Kepemimpinan Jusuf Kalla 2004-2009”, <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S47240-M%20Hasan%20Saeful%20Rijal>, hlm. 3, yang diunduh pada 8 Maret 2017.

struktur kepengurusan yang dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM.⁵

Konflik ini disebabkan bergabungnya Aburizal Bakrie pada calon Presiden Prabowo-Hatta yang membuat beberapa kader Partai Golkar kecewa. Tampak dari Beberapa kader Partai Golkar di daerah yang mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Sebagai contoh 30 DPD II Golkar, seperti DPD II Golkar Banda Aceh mendukung pasangan Jokowi-JK. Selain itu, Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo⁶

Muhammad Jusuf Kalla dianggap sebagai kader senior dari Partai Golkar yang telah memiliki pengalaman dan dicalonkan sebagai Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo. Sebagai tokoh senior JK mempunyai banyak pengalaman di pemerintahan dan juga mempunyai pengaruh besar terhadap simpatisan dan kader Partai Golkar di provinsi dan daerah.⁷

Akibat dukungan terhadap salah satu calon, internal Partai Golkar menjadi terpecah. Perpecahan ini semakin memuncak ketika adanya perbedaan pendapat mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas). Bila sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar sesuai Munas Riau tahun 2009, seharusnya Munas dilaksanakan pada Januari 2015. Akan tetapi, Aburizal Bakrie mempercepat penyelenggaraan Munas pada 30 November hingga 2 Desember 2014 di Bali.⁸

Sementara dari kubu yang berbeda, Agung Laksono menolak percepatan Munas dan meminta agar Munas tetap diselenggarakan pada Januari 2015. Agung Laksono bersama kelompoknya membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar dan mengadakan Munas Tandingan. Setelah

kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono melaksanakan Munas dan menetapkan masing-masing Ketua Umum, kedua kubu mengajukan struktur kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM.⁹

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Menteri Hukum dan HAM bernomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang pengesahan Perubahan AD/ART serta komposisi dan personalia DPP Partai Golkar kembali menimbulkan permasalahan, karena kubu Aburizal Bakrie menganggap surat keputusan didasarkan pada aspek politis. Anggapan ini muncul karena pada Rapimnas Golkar kubu Aburizal Bakrie telah menyepakati Golkar menjadi anggota Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengambil posisi oposisi terhadap pemerintah.¹⁰ Kubu Aburizal Bakrie mengusulkan Hak Angket (penyelidikan) terhadap Menteri Hukum dan HAM atas intervensi pemerintah terhadap parpol saat Sidang Paripurna DPR 7 April 2015.¹¹ Sebanyak 116 orang Anggota DPR dari lima fraksi anggota Koalisi Merah Putih yaitu Fraksi Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menandatangani surat pengajuan hak angket yang diserahkan ke pimpinan DPR. Dasar pengajuan hak angket tersebut dikaitkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang dinilai tidak tepat terkait konflik di Partai Golkar dan PPP.¹²

Selanjutnya kubu Aburizal Bakrie melanjutkan dengan melakukan gugatan SK Menkumham tersebut ke PTUN, dan menilai SK tersebut merupakan campur tangan politik. Seharusnya jika penyelesaian lewat Mahkamah

⁵ Indra J. Piliang, "Kronologi Perang Beringin" <https://www.selasar.com/jurnal/5583/Kronologi-Perang-Beringin>, pada 8 Maret 2017.

⁶ Feriolus Nawali, "Ketua DPD Gorontalo Minta Golkar Dukung Jokowi-JK" <http://politik.rmol.co/read/2014/11/25/181186/Ketua-DPD-Gorontalo-Minta-Golkar-Dukung-Jokowi-JK>-diakses pada 20 Mei 2018.

⁷ Leni Yuliani, *Sikap Elite Partai Golongan Karya Terhadap Konflik Internal Partai Golongan Karya (Studi Pada DPD I Provinsi Lampung)*, Skripsi, (Lampung.: Universitas Lampung, 2015), hlm. 2.

⁸ Rijal dan Ichwanuddin, "Dinamika Politik Internal Partai Golkar.", hlm. 3

⁹ *Ibid.*

¹⁰ "Alasan Menkumham Perpanjang SK Golkar Munas Riau" yang bersumber dari situs <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56a9f14abfb91/ini-alasan-menkumham-perpanjang-sk-golkar-munas-riau>, diakses pada 12 Oktober 2017.

¹¹ Pusat Data Republika, "Jejak Pertarungan Internal Golkar", <http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/15/05/11/no65w612-jejak-pertarungan-internal-golkar>, diakses pada 20 Oktober 2017.

¹² "Dualisme Internal Fraksi: Langkah Mundur Wakil Rakyat" yang bersumber dari situs <http://print.kompas.com/baca/2015/03/29/Langkah-Mundur-Wakil-Rakyat>, diakses pada 16 Oktober 2017.

Partai mengalami *deadlock*, penyelesaiannya adalah ke pengadilan. Setelah ada keputusan berkekuatan hukum tetap, barulah SK Menkumham bisa dikeluarkan.¹³

Konflik antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono tidak hanya membuat perpecahan di elit Partai Golkar, tetapi juga memunculkan konflik di Fraksi Partai Golkar DPR RI dan pengurus Partai Golkar di tingkat provinsi, kabupaten, dan kotamadya. Sebagai contoh perpecahan terjadi pada kepengurusan Partai Golkar di Provinsi Lampung, yaitu antara M. Alzier Dianis Thabranie dari Kubu Aburizal Bakrie dengan Heru Sambodo dari Kubu Agung Laksono.¹⁴

Konflik yang terjadi di tingkat elit Partai Golkar terus berkembang bukan hanya pada tingkat Partai Golkar, tetapi hingga konflik antar lembaga negara, yaitu lembaga legislatif dan eksekutif. Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono menunjuk Agus Gumiwang untuk menggantikan Ade Komarudin dari kubu Aburizal Bakrie.¹⁵ Kubu Aburizal Bakrie kemudian melakukan rotasi terhadap 56 orang Anggota DPR RI pendukung Agung Laksono di DPR pada April 2015.¹⁶ Selain itu, terjadi perebutan kantor Sekretariat Fraksi Partai Golkar DPR RI oleh kedua kubu pengurus Partai Golkar.¹⁷

Pembuatan Undang-Undang yang menjadi tugas bersama antara pemerintah dengan lembaga legislatif menjadi terhambat. Konflik Partai Golkar bukan hanya menghambat pembuatan undang-undang namun juga menyebabkan

hubungan lembaga legislatif dan eksekutif tidak harmonis. Bambang Soesatyo, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI versi Munas Bali, mengatakan akan melawan setiap pembahasan pemerintah di setiap komisi. Semenjak keputusan Menteri Hukum dan HAM, Golkar akan keras mengkritisi setiap kebijakan pemerintah.¹⁸

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yossi Hagaita Tarigan pada tahun 2016, konflik Munas Bali dan Munas Ancol pada tahun 2014-2016, tidak hanya mencakup satu faktor. Hasil penelitian Tarigan menunjukkan terdapat tiga faktor yang menyebabkan konflik tersebut antara lain; *pertama*, mekanisme pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan AD/ART mengakibatkan kekecewaan dan mengurangi kepercayaan diantara anggota sehingga berdampak kepada resistensi yang memungkinkan kohesifitas partai semakin lemah; *kedua*, lemahnya ideologi dan doktrin partai sehingga tidak terbentuk identitas khas anggota partai; dan *ketiga*, Mahkamah Partai tidak berperan aktif mencegah konflik serta hasil putusan Mahkamah Partai tidak bersifat final dan mengikat, sehingga penyelesaian memicu konflik yang dapat diidentifikasi pada munculnya faksi yang tidak terkendali dan ketidakmampuan partai untuk beradaptasi dengan tuntutan anggota partai.¹⁹

Meski demikian Partai Golkar pada akhirnya mencapai konsensus elit, yaitu melalui Musyawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diselenggarakan pada bulan Mei 2016. Menghasilkan keputusan antara lain, (1) mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar Nomor 5/Munas 9/2014 tentang posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih; (2) Menginstruksikan kepada Ketua Umum Partai Golkar terpilih untuk memperjuangkan Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai pahlawan nasional; (3) pencabutan sanksi organisasi pemberhentian sebagai anggota Partai Golkar antara lain atas nama Agus Gumiwang dan Nusron Wahid serta beberapa kader lainnya; (4) Munaslub mengesahkan Aburizal Bakrie yang

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Yossi Hagaita Tarigan, *Lemahnya Pelembagaan Mengakibatkan Konflik Partai Golkar Pada November 2014-Januari 2016: Studi Kasus Munas Bali dan Munas Ancol, Tesis* (Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016), hlm. 8.

¹³ Pusat Data Republika, "Jejak Pertarungan Internal Golkar"

¹⁴ Leni Yuliani, *Sikap Elite Partai Golongan Karya terhadap Konflik Internal Partai Golongan Karya: Studi pada DPD I Provinsi Lampung*, Skripsi (Lampung: Universitas Lampung, 2015), hlm. 7.

¹⁵ Suriyanto, "Dualisme Fraksi Golkar Ganggu Koordinasi di DPR", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141211094642-32-17429/dualisme-fraksi-golkar-ganggu-koordinasi-di-dpr/>, diakses pada 12 Oktober 2017.

¹⁶ "Hasil Verifikasi Rotasi AKD ke-27 Anggota Golkar Pro Agung Laksono". <http://wikidpr.org/news/wikidpr-hasil-verifikasi-ke-komisi-apa-saja-27-anggota-golkar-pro-agung-laksono-dirotsi>, diakses pada 12 Oktober 2017.

¹⁷ "Bareskrim Menindaklanjuti Laporan Agung Laksono atas Perebutan Ruang Fraksi Golkar", <http://print.kompas.com/baca/2015/04/11/Bareskrim-Proses-Laporan-Kubu-Agung>, diakses pada 16 Oktober 2017.

sebelumnya Ketua Umum demisioner Golkar menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar, dan (5) memutuskan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.²⁰

Pada sisi yang berbeda, Indra J. Piliang, tokoh muda Partai Golkar menyebutkan jika konflik Partai Golkar tahun 2014-2016 disebabkan perebutan kekuasaan antar dua elit. Bukan pada garis ideologi partai, tetapi lebih kepada perebutan kedekatan terhadap penguasa baru.²¹

Munaslub ini membuktikan anti-tesis dari asumsi sejarah konflik Partai Golkar selalu menghasilkan perpecahan partai, dengan didirikannya partai baru yang diketuai oleh mantan kader Partai Golkar. Konsensus pasca Munas 2016 merupakan keberhasilan konsensus politik pertama kali bagi Partai Golkar, karena konflik ini tidak menghasilkan partai politik baru.

Penelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi konsensus Partai Golkar dan proses konsensus Partai Golkar pada tahun 2014-2016. Dengan menerapkan metode penelitian kualitatif maka riset ini akan mencari penjelasan mengenai konsensus politik pada konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Terkait dengan metodologi riset ini, diperoleh data melalui dua cara pengumpulan data meliputi studi pustaka dan wawancara di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Beberapa narasumber dipilih berasal dari tokoh petinggi Partai Golkar yang berkonflik dan pihak eksternal yang berasal dari pemerintah. Sementara tokoh muda Partai Golkar dinilai dapat memperkaya analisis riset ini.

Konsensus Politik

Maswadi Rauf yang membahas mengenai konflik politik mengatakan bahwa konflik politik adalah sebuah gejala sosial yang terdapat di dalam masyarakat pada setiap kurun waktu.²²

²⁰ Danu Damarjati, "Keputusan Munaslub Golkar", <https://news.detik.com/berita/3211910/keputusan-munaslub-golkar-keluar-kmp-hingga-dukung-gelar-pahlawan-soeharto>, diakses pada 20 November 2017.

²¹ Wawancara terhadap Indra J. Piliang pada 24 Maret 2018, di Jakarta.

²² Maswadi Rauf, *Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hlm. 2.

Penguasa politik mempunyai peran sebagai pelaksana pengelolaan konflik (*management of conflict* atau *conflict management*). Penguasa diberikan kewenangan dalam membuat ketentuan-ketentuan yang membatasi kebebasan individu melalui berbagai peraturan demi kepentingan masyarakat luas. Penguasa politik diberikan kewenangan untuk menghukum warga negara yang melanggar peraturan atas nama masyarakat. Namun, kekuasaan yang besar ini dapat membuka peluang bagi penguasa politik untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Akibatnya, penguasa politik tidak lagi menonjolkan perannya sebagai pengelola konflik, tetapi sudah menjadi salah satu pihak yang berkonflik. Adanya kecenderungan penguasa politik untuk mempertahankan kekuasaannya menyebabkan penguasa politik terlibat dalam konflik dengan rakyatnya sendiri yang kecewa dengan penderitaan yang mereka alami.²³

Maswadi Rauf dalam bukunya juga menjelaskan mengenai penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik (*conflict resolution*) adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan (atau menghilangkan) konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Penyelesaian konflik harus dilakukan agar mencegah semakin dalamnya konflik, yang berarti semakin tajam perbedaan antara pihak-pihak yang bertikai dan semakin luasnya konflik yang berarti semakin banyak pihak yang ikut dalam konflik.²⁴

Konflik berakhir secara tuntas bila pihak-pihak yang berkonflik berhasil mencapai titik temu dari perbedaan. Menurut Maswadi Rauf titik temu dari perbedaan itulah yang kemudian disebut konsensus atau kompromi, dimana hal itu bisa dicapai hanya melalui dua cara, yaitu (1) tanpa perantara dan (2) dengan perantara (mediator). Selanjutnya, kedua cara ini akan bermuara ke salah satu dari empat model konsensus yang ada, yaitu (1) konsensus "model pendapat internal", (2) konsensus "model pendapat dominan", (3) konsensus "model pendapat luar", dan (4) konsensus "model gabungan".

²³ *Ibid.*, hlm. 25

²⁴ *Ibid.*, hlm. 8-9

Model pertama merupakan gabungan dari butir-butir pendapat dari pihak-pihak yang berkonflik, semua butir-butir yang tidak disepakati oleh pihak yang berkonflik disepakati untuk dibuang. Pada model kedua tampak pendapat dari salah satu pihak yang berkonflik disepakati untuk dijadikan konsensus oleh pihak lainnya. Kemudian pada model ketiga tampak semua pendapat dari pihak yang berkonflik disepakati untuk dibuang lalu diganti dengan pendapat pihak luar untuk dijadikan konsensus oleh pihak-pihak yang berkonflik. Sedangkan pada model keempat tampak gabungan antara pendapat dari salah satu pihak yang berkonflik dan pendapat dari pihak luar.

Selain keempat model itu, Maswadi Rauf mengajukan konsensus model pengadilan yang juga dapat dipakai bila keempat model tersebut gagal dilaksanakan. Akan tetapi, model terakhir ini menurut Maswadi Rauf tidak didasarkan pada perubahan pendapat dari pihak-pihak yang berkonflik, melainkan melalui wewenang pemerintah yang diatur sesuai hukum yang berlaku. Kedua belah pihak yang terlibat konflik harus menerima pendapat luar, yaitu keputusan pengadilan untuk mengakhiri konflik terlepas siapa yang diuntungkan.

Konflik elit yang terjadi pada Partai Golkar tidak bisa menerima pendapat luar yaitu keputusan pengadilan, tetapi pada akhirnya dapat dilakukan melalui pihak lain yaitu melalui Pemerintahan Joko Widodo. Sedangkan model konsensus yang terjadi pada konflik Partai Golkar merupakan konsensus model gabungan, dimana pendapat dari elit-elit yang berkonflik yang dimasukkan dan juga terdapat faktor pendorong konsensus yang berasal dari pihak luar, yaitu melalui Pemerintah Joko Widodo yang diwakili Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Penyatuan Elit

Menurut John Higley dalam bukunya *Elite Foundations of Liberal Democracy*, membagi tiga tipe elit politik antara lain:²⁵

1. *Disunited Elite*, yaitu elit yang tidak menyatu. Hal ini disebabkan integrasi

struktural dan konsensus nilai minimal pada komunikasi dan jaringan organisasi, yang tidak terjadi pada garis partisan dan elit secara komprehensif. Faksi partisan dan elit dari berbagai sektor saling tidak percaya, sering terlibat permusuhan dengan menggunakan kekerasan, yang menunjukkan karakter *politics as war*.

2. *Ideologically United Elite*, yang ditandai adanya kesamaan profesi dan kesatuan ideologi pada hampir seluruh elit. Kelompok elit menghindari posisi berkonflik di depan publik, mereka menampilkan satu kesatuan kepemimpinan organisasi. Integrasi struktural ekstensif, yang ditunjukkan komunikasi dan pengaruh jaringan mencapai seluruh anggota organisasi, dan biasanya tersentralisasi pada sejumlah kecil pemimpin melalui gerakan, partai, yang mereka kepalai. Konsensus nilai ekstensif, ditunjukkan dengan anggota elit menunjukkan tidak terdapat pertentangan pada setiap *statement* publik. Elit menunjukkan karakter yang monolitik, dan setiap anggota mempercayai ideologi, daripada tawar menawar ataupun perang elit.
3. *Consensually Elite*, yang ditunjukkan dengan adanya *overlapping* dan saling mengunci jaringan pada seluruh faksi dan elit, dengan tidak ada satupun faksi atau elit menguasai jaringan. Konsensus nilai ditunjukkan dengan meski elit sering berposisi terhadap satu permasalahan, mereka tetap melakukan konsensus dalam rangka menjaga institusi yang telah ada. Anggota elit dan faksi saling tidak percaya, mereka bekerja sama disaat terdapat isu yang eksplosif, dan kompetisi bagi kekuasaan politik mempunyai ciri tawar-menawar.

Dalam konsensus elit yang terjadi pada Partai Golkar tahun 2014-2016, ditunjukkan dengan *consensually elite*. Elite menyatu pada satu sisi, namun pada sisi yang berbeda mereka tetap berkonflik. Meski demikian konflik antar mereka tidak sampai pada melepaskan jati diri dari Partai Golkar.

²⁵ John Higley, *Elite Foundations of Liberal Democracy* (New York: Rowman and Littlefield Publisher, 2006), hlm. 14.

Faktor-Faktor Konsensus Politik Partai Golkar

Berbagai upaya dilakukan oleh elit Partai Golkar maupun pihak luar dalam rangka mencapai konsensus Partai Golkar. Upaya konsensus Partai Golkar diawali dari pembentukan Tim 10 menjelang Pilkada Serentak tahun 2015.²⁶ Kekhawatiran Partai Golkar tidak ikut pada Pilkada Serentak tahun 2015, menjadi pemicu kedua kubu yang berkonflik untuk melakukan islah sementara. Meski sifatnya saat itu masih sementara, tetapi menunjukkan elit Partai Golkar yang berkonflik dapat mencapai konsensus yang seutuhnya. Selanjutnya diselenggarakan Silaturahmi Nasional (Silatnas) tahun 2015 yang bertujuan untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. Upaya selanjutnya dilakukan dengan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2016 yang menjadi landasan terselenggaranya Munaslub tahun 2016.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai konsensus Partai Golkar tidak lepas dari adanya dua faktor pendukung konsensus Partai Golkar. Terdapat dua faktor yang menyebabkan konsensus Partai Golkar, menggunakan model pendapat yang dijelaskan dalam teori konsensus Maswadi Rauf, yaitu (1) faktor internal atau model pendapat dalam dan (2) faktor eksternal atau model pendapat luar. Faktor internal atau model pendapat dalam yang dimaksud, yaitu elit-elit yang berkonflik dan dukungan pengurus daerah Partai Golkar. Sementara faktor eksternal atau model pendapat luar terkait kondisi politik nasional dan upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh senior Partai Golkar namun pada saat konflik berada di luar struktur Partai Golkar dan berada di struktur pemerintahan, maupun pihak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Model pendapat dalam atau faktor internal dapat digambarkan dari berbagai kepentingan dari elit-elit yang berkonflik, yaitu kepentingan elit dari faksi Aburizal Bakrie dan faksi Agung Laksono. Kepentingan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono untuk tetap menguasai Partai

Golkar menyebabkan Partai Golkar urung mencapai konsensus politik. Namun hasil yang dicapai saat Munaslub tahun 2016 dengan mengembalikan posisi Dewan Pembina Partai Golkar yang sebelumnya sempat hilang pada masa reformasi, menjadi penengah bagi kepentingan baik kelompok Aburizal maupun Agung Laksono. Posisi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar ini memberikan posisi tersendiri bagi Aburizal Bakrie, sehingga pada derajat tertentu masih mempunyai pengaruh besar dalam pembuatan keputusan di Partai Golkar. Sementara pada pihak lain, Agung Laksono diberikan mandat sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.

Kemenangan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016, memberikan kedua kubu posisi yang sejajar. Novanto yang akhirnya terpilih menjadi Ketua DPR RI merestrukturisasi pengurus Partai Golkar baik di tingkat Fraksi DPR RI, DPD Tingkat I hingga DPD Tingkat II. Sehingga yang terjadi adalah kondisi yang sama terjadi seperti Partai Golkar sebelum konflik tahun 2014. Kondisi yang terjadi pada konflik Partai Golkar tahun 2014-2016 menunjukkan adanya *overlapping* dan saling mengunci jaringan pada seluruh faksi dan elit, dengan tidak ada satupun faksi atau elit menguasai jaringan. Hal ini dijelaskan oleh John Higley sebagai *consensual elite*. Ideologi bukan menjadi faktor terjadinya konsensus.

Pada sisi yang berbeda, Indra J. Piliang beranggapan konsensus Partai Golkar disebabkan oleh konflik yang terlalu lama. Selain itu konflik menyebabkan kerusakan yang besar pada partai, dicontohkannya hasil Pilkada Serentak tahun 2015, Partai Golkar berada di posisi nomor 10, dengan hanya berhasil memenangkan 49 daerah yang melakukan Pilkada serentak tahun 2015. Posisi Golkar masih jauh dibelakang PDIP (105 daerah), Gerindra (87 daerah), Nasdem (85 daerah), PAN (80 daerah), PKS (75 daerah), Demokrat (68 daerah), dan PKB (65 daerah).²⁷

²⁶ Sucipto, "Pembentukan Tim Pilkada Partai Golkar Disepakati", Sindonews, <https://nasional.sindonews.com/read/1013136/149/pembentukan-tim-pilkada-partai-golkar-disepakati-1434423185>, diakses pada 23 Desember 2017.

²⁷ Ghoidah Rahmah, "PDIP Juara Pilkada, Golkar Terpuruk, Ini Daftarnya", <https://pilkada.tempo.co/read/727461/pdip-juarai-pilkada-golkar-terpuruk-ini-daftarnya> diakses pada 18 Mei 2018.

Situasi pada saat itu memunculkan semangat untuk rekonsiliasi. *Cost* politik yang dihasilkan konflik lebih mahal.²⁸ Sedangkan Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak mempunyai pilihan, karena mereka tidak memiliki jalan keluar lainnya sehingga rekonsiliasi lebih disebabkan keterpaksaan. Hal ini disebabkan karena konflik terus menerus dapat menurunkan suara Partai dan tidak baik bagi Partai Golkar ke depannya.²⁹

Hal ini sesuai dengan pendapat dari John Higley bahwa pemersatu elit Partai Golkar yaitu *consensual elite* dimana elit-elit partai saling mengunci jaringan satu sama lain, sehingga terjadi stagnansi konflik yang tidak menemukan jalan keluar. Pada sisi yang berbeda kedua belah pihak tidak menginginkan pendirian partai baru.

Sementara itu, untuk faktor eksternal penyelesaian konflik adalah adanya dorongan atau campur tangan untuk terciptanya stabilitas politik nasional. Kemunculan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) pasca Pemilihan Presiden tahun 2014 menjadi faktor yang mempengaruhi politik nasional tahun 2014-2016. Keberadaan kelompok partai oposisi yang terdiri atas Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebabkan ketidakstabilan politik dalam pembuatan berbagai kebijakan pemerintah. Sementara itu, koalisi partai pendukung pemerintah, antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mampu mengimbangi penguasaan di parlemen, terbukti dengan kekalahan KIH dalam penguasaan pada posisi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta alat kelengkapan DPR. Partai Golkar di bawah Aburizal Bakrie secara resmi mendukung KMP dan menolak bergabung menjadi partai pendukung pemerintah. Namun pada sisi yang berbeda, muncul Agung Laksono yang mendukung KIH. Konflik antara pihak

Aburizal Bakrie dan Agung Laksono turut memanaskan persaingan KIH dan KMP yang dipuncaki dengan pengesahan kepengurusan Munas Ancol di bawah Agung Laksono oleh Yasonna Laoly. KMP langsung bereaksi dengan mengajukan hak angket kepada pemerintah. Kondisi ini terus berlanjut dan menyebabkan terhentinya pembahasan berbagai undang-undang di parlemen, serta mempengaruhi kelancaran program-program pemerintah. Untuk itu, terdapat kepentingan pemerintah memasukkan Partai Golkar ke dalam KIH serta melakukan campur tangan penyelesaian konflik Partai Golkar.

Kekhawatiran ini kemudian menjadi justifikasi bagi tokoh-tokoh Partai Golkar yang tidak lagi aktif dalam kepengurusan Partai Golkar namun menjadi bagian dari Pemerintah untuk memberikan campur tangan terhadap konsensus Partai Golkar. Setidaknya terdapat tiga tokoh dalam pemerintahan yang ikut turut campur tangan dalam konsensus Partai Golkar yakni Jusuf Kalla, Yasonna Laoly, dan Luhut Binsar Pandjaitan. Tokoh pertama, yaitu Jusuf Kalla melobi Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang saat itu sedang berkonflik untuk bisa ikut Pilkada, dengan syarat calon yang diajukan mendapat tanda tangan kedua belah pihak bersengketa. Namun usulan tersebut ditolak KPU, karena tidak mempunyai landasan UU. Jusuf Kalla juga menjadi inisiator Silaturahmi Nasional Partai Golkar, serta hadir pada Rapimnas Partai Golkar. Bahkan hasil wawancara Toriq, menunjukkan adanya dukungan JK terhadap salah satu calon Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut wawancara dengan Jusuf Kalla, kekhawatiran akan bubarnya Partai Golkar menjadi alasan utama pemerintah turut campur dalam upaya konsensus Partai Golkar. Salah satu contoh keterlibatan tersebut tampak saat pembentukan Tim 10 Partai Golkar jelang Pilkada tahun 2015. Jika Partai Golkar tidak ikut dalam Pilkada maka dikhawatirkan Partai Golkar akan menjadi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Menurut Jusuf Kalla keterlibatannya ketika jelang Pilkada karena khawatir jika Partai Golkar tidak ikut dalam Pemilu maka demokrasi Indonesia akan cacat. Oleh karena itu, Jusuf Kalla

²⁸ Wawancara terhadap Luhut Binsar Pandjaitan pada 22 Maret 2018, di Jakarta.

²⁹ Wawancara terhadap Indra J. Piliang pada 24 Maret 2018, di Jakarta.

kemudian melakukan pendekatan satu-per-satu ke KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan beberapa partai politik agar tidak keberatan jika Partai yang berkonflik tetap harus ikut Pilkada, yakni Partai Golkar dan PPP. Untuk itu, diakuinya jika dirinya mengundang ke rumahnya antara lain, Ketua-Ketua Partai Politik termasuk Ketua Komisi II DPR RI, Fadli Zon (Wakil Ketua DPR RI bidang Politik dan Keamanan dari Fraksi Partai Gerindra), serta Anggota KPU dan Bawaslu. Sedang dari Pemerintah Jusuf Kalla mengundang Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI.³⁰

Bahkan Jusuf Kalla secara lebih lanjut mengakui jika pemerintah sengaja mengaktifkan kembali SK Kepengurusan Munas Riau tahun 2009 meski jangka waktunya telah mati. Hal tersebut didukung oleh Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan dan mencabut SK Menkumham tentang Munas Ancol. Di lain pihak, MA juga menolak pengesahan Munas Bali.³¹

Jusuf Kalla mengakui jika dirinya berperan sebagai mediator. Sebelum tahun 2015, dirinya mengakui jika konflik Golkar berlanjut karena tidak ada proses mediasi. Sehingga Jusuf Kalla selanjutnya melakukan mediasi dan dipercaya oleh kedua pihak. Kedua belah pihak percaya Jusuf Kalla sebagai pihak yang netral. Sementara menurut Jusuf Kalla, dalam konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak tercapai konsensus karena terdapat satu pihak yang tidak mau mengalah.³²

Sementara Menkumham Yasonna Laoly, menunjukkan intervensi pemerintah dalam upaya konsensus Partai Golkar, khususnya menjelang Munaslub Partai Golkar. Secara khusus, Yasonna mengatakan pemerintah telah mengaktifkan kembali kepengurusan hasil Munas Riau agar bisa menggelar Munas islah yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan. Pengaktifan kembali kepengurusan hasil Munas Riau menunjukkan upaya pemerintah yang

³⁰ Wawancara terhadap Muhammad Jusuf Kalla pada 24 Maret 2018, di Jakarta.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

cukup jelas, karena mengaktifkan kembali SK kepengurusan partai politik yang telah habis masa berlakunya serta menganulir SK baru yang telah mengesahkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Fenomena ini sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh pemerintah.³³

Sedangkan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam RI) menunjukkan pengaruhnya dalam upaya konsensus Partai Golkar dengan mengumpulkan Ketua-Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar menjelang Munaslub Partai Golkar tahun 2016. Informasi ini disebutkan sendiri oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato di Munaslub Partai Golkar.

Luhut Binsar Pandjaitan mengakui jika pihaknya sebagai Menkopolkam RI menginginkan Partai Golkar tidak pecah. Terdapat kekhawatiran jika Partai Golkar terpecah lagi akan tidak baik bagi demokrasi Indonesia. Secara keseluruhan terdapat tiga faktor pemerintah turut campur dalam konsensus Partai Golkar, pertama, ada keinginan dari Presiden Joko Widodo untuk merangkul seluruh partai politik, kedua, Presiden Joko Widodo tidak ingin ada kegaduhan jika Partai Golkar pecah, ketiga disebabkan karena secara pribadi, Luhut merupakan kader Partai Golkar.³⁴

Di sisi lain, Luhut memandang penting bagi Partai Golkar untuk berkoalisi dengan pemerintah. Partai Golkar mempunyai mimpi pada tahun 2019 memperoleh 120 kursi. Kondisi tersebut akan mudah dicapai jika Partai Golkar bergabung dengan pemerintah menjadi partai koalisi. Partai Golkar akan diuntungkan dengan popularitas Presiden Joko Widodo dan Partai Golkar akan terangkat suaranya.³⁵

Harus diakui jika faktor eksternal berperan besar dalam konsensus Partai Golkar. Salah satu peran besar tersebut saat pembentukan Tim 10

³³ Yandi Mohammad, "Pemerintah Sahkan Golkar Munas Riau, Muncul isu Partai Golkar, Muncul Isu Partai Golkar Indonesia", <https://beritagar.id/artikel/berita/pemerintah-sahkan-golkar-munas-riau-muncul-isu-partai-golkar-indonesia>, diakses pada 22 Maret 2018.

³⁴ Wawancara terhadap Luhut Binsar Pandjaitan pada 22 Maret 2018, di Jakarta.

³⁵ *Ibid.*

menjelang Pilkada tahun 2015. Pembentukan Tim 10 merupakan bagian dari upaya faktor eksternal dalam konsensus Partai Golkar. Hal ini disepakati oleh Jusuf Kalla dan Indra J. Piliang, bahwa intervensi dilakukan melalui DPR dan KPU, serta Bawaslu dan disahkan oleh Kemenkumham untuk menyetujui pembentukan Tim 10 Partai Golkar.³⁶

Pemerintah sebagai penguasa politik mempunyai peranan dalam pelaksanaan pengelolaan konflik (*conflict management*). Terdapat kepentingan pihak pemerintah dalam rangka menjaga konflik Golkar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Golkar merupakan partai kedua dengan perolehan suara terbesar dalam pemilu 2014 setelah PDIP yang berpengaruh tinggi dalam konteks KMP dan KIH. Upaya Agung Laksono membawa Golkar ke KIH menjadi episentrum konflik dan imbasnya kinerja DPR menjadi tidak efektif. Selain itu, konflik Partai Golkar menyebabkan instabilitas politik tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di level lokal. Stabilitas politik sangatlah penting bagi efektifitas pemerintahan, termasuk saat dimasukkannya Airlangga Hartanto sebagai Menteri Perindustrian pada *Reshuffle* Pemerintahan Joko Widodo.

Terdapat simbiosis mutualisme hubungan antara Golkar dengan pemerintahan Joko Widodo. Golkar membutuhkan kekuasaan, karena dapat mendatangkan akses dan peluang politik serta mengamankan kepentingan hubungan *patron-client* baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini juga disebabkan karena Golkar ditopang oleh jejaring pengusaha sampai ke daerah, terutama anggota Kadin. Sementara Joko Widodo membutuhkan dukungan politik, karena dengan bergantung kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tidak cukup untuk mengamankan dukungan di parlemen dan di pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Proses Konsensus Politik Partai Golkar

Proses penyelesaian konflik dan konsensus politik di Partai Golkar sendiri, dapat dibagi menjadi tiga bentuk. Bentuk pertama adalah melalui proses penyelesaian konflik melalui

mekanisme organisatoris yaitu proses mekanisme Mahkamah Partai Golkar atau pelebagaan partai, yang menghasilkan Keputusan Mahkamah Partai Golkar yang berujung pada dukungan pemerintah pada kepengurusan Agung Laksono dan dilanjutkan pelaporan masing-masing pihak yang berkonflik di pengadilan hingga Mahkamah Agung. Proses penyelesaian konflik selanjutnya dilakukan oleh kedua kelompok melalui jalur hukum, yang keputusannya cenderung berimbang, karena kedua belah pihak sama-sama maju ke Pengadilan maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bentuk ketiga adalah melalui jalur politik, yang melibatkan internal maupun peran kelompok luar yaitu Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Upaya penyelesaian konflik pertama, yaitu melalui Mahkamah Partai Golkar. Sesuai dengan proses kelembagaan dan manajemen konflik internal Partai Golkar yang diatur melalui peraturan. Terdapat dua tingkat mekanisme resolusi konflik, yaitu upaya pencegahan sebelum konflik terjadi dan penghentian konflik setelah konflik berlangsung. Partai politik sudah seharusnya mempunyai aturan untuk memecahkan konflik internal dan membentuk badan yang berfungsi menangani masalah konflik internal. Keberadaan mekanisme atau badan yang menangani fungsi ini penting karena partai politik sebagai sebuah sistem memiliki tanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan fungsi partai, termasuk pengelolaan soliditas internal. Agar dapat mengoperasikan fungsi ini, mekanisme ini mempunyai posisi khusus hampir sama seperti yudikatif dalam sistem pemerintahan. Tokoh yang mampu dan dihormati merupakan bagian dari badan ini yang dilengkapi dengan hak-hak independen untuk menyusun kebijakan dan bebas dari intervensi.³⁷

Partai Golkar memiliki lembaga Mahkamah Partai yang dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011. Salah satu tugas dari dewan pimpinan Partai Golkar adalah menyelesaikan perselisihan kepengurusan. Sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik No 2 Tahun 2011, perselisihan dalam partai politik seperti

³⁶ Wawancara terhadap Indra J. Piliang dan Muhammad Jusuf Kalla pada 24 Maret 2018, di Jakarta.

³⁷ Tarigan, *Lemahnya Pelebagaan Mengakibatkan Konflik..*, hlm. 10

konflik pimpinan, kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan keberatan terhadap kepengurusan partai.³⁸ Keputusan Mahkamah Partai Golkar tanggal 3 Maret 2015, sebagai berikut:³⁹

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif dibawah kepemimpinan Agung Laksono, dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar dari DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang memenuhi kriteria Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT), dengan tugas utama melakukan konsolidasi partai, mulai Musda tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan Munas Partai Golkar selambat-lambatnya tahun 2016, serta secara simultan melakukan konsolidasi pada alat-alat kelengkapan partai lainnya.
2. Meminta Mahkamah Partai memantau proses konsolidasi tersebut sampai tuntas pada Oktober 2016.

Mahkamah Partai Golkar tidak berhasil menyelesaikan konflik kepengurusan Partai Golkar. Dalam sidang Mahkamah Partai Golkar saat itu, dua anggota Mahkamah Partai, Muladi dan HAS Natabaya, menyatakan tidak ingin berpendapat karena pengurus Golkar hasil Munas IX Bali, atau kubu Aburizal, sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan sela PN Jakarta Barat. Hal tersebut dianggap Muladi dan Natabaya sebagai sikap bahwa kubu Aburizal tidak ingin menyelesaikan perselisihan kepengurusan Golkar melalui Mahkamah Partai Golkar. Dengan sikap tersebut, Muladi dan Natabaya hanya memberikan rekomendasi agar kubu yang menang tidak mengambil semuanya (*the winners takes all*), merehabilitasi kader

³⁸ Imam Anshori Saleh, "Mahkamah Partai Tak Bergigi", <https://www.tempo.co/read/kolom/2016/01/25/2358/mahkamah-partai-tak-bergigi>, diakses pada 5 Mei 2017.

³⁹ "Ini Isi Amar Putusan Mahkamah Partai Golkar", <http://news.analisadaily.com/read/ini-isi-amar-putusan-mahkamah-partai-golkar/123494/2015/04/10>, diakses pada 21 Mei 2017.

Golkar yang dipecat, mengakomodasi kubu yang kalah dalam kepengurusan, dan kubu yang kalah diminta untuk tidak membentuk partai baru.⁴⁰

Sementara itu, anggota lain Majelis Mahkamah Partai Golkar, Djasri Marin dan Andi Mattalatta, menilai Munas IX Bali yang menetapkan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Golkar secara aklamasi digelar tidak demokratis. Djasri dan Andi menilai pelaksanaan Munas IX Jakarta jauh lebih terbuka, transparan, dan demokratis meski di lain sisi memiliki banyak kekurangan.⁴¹

Dengan memanfaatkan momentum konflik internal, pemerintah justru mengambil keputusan untuk mendukung kepengurusan Agung Laksono, dengan dalih sesuai dengan hasil Mahkamah Partai Golkar. Uluran tangan pemerintah yang diklaim untuk membantu keutuhan partai, karena terdapat kepentingan untuk menyingkirkan pihak yang berpotensi menyulitkan pemerintah di kemudian hari. Komitmen Faksi Agung Laksono di awal pembentukannya untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat Pemerintahan Joko Widodo menjadi kartu pas dukungan pemerintah bagi Faksi Agung. Namun dukungan pemerintah ini menciptakan permasalahan baru, karena upaya konsensus Partai Golkar justru masuk pada fase kedua yaitu fase jalur hukum.

Upaya penyelesaian konflik selanjutnya terjadi melalui jalur hukum. Baik pihak Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono, masing-masing membawa masalah Partai Golkar ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Namun putusan hakim pada kedua pengadilan tersebut pada realitanya tidak membawa efek positif dalam menyelesaikan konflik Partai Golkar, bahkan konflik antara kedua pihak semakin memuncak.⁴² Mahkamah Agung pada akhirnya memutuskan untuk kembali

⁴⁰ M. Toto Suryaningtyas, "Merunut Sejarah Konflik Partai Golkar", <http://print.kompas.com/baca/2016/01/13/Merunut-Sejarah-Konflik-Partai-Golkar>, diakses pada 13 Mei 2017.

⁴¹ Abba Gabrillin, "Putusan Mahkamah Partai Golkar Tidak Mengikat", <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/20/16493251/Putusan.Mahkamah.Partai.Golkar.Dinilai.Tidak.Mengikat>, diakses pada 20 November 2017.

⁴² Ach Busairi, *Dualisme Kepemimpinan Dalam Partai Golkar* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), hlm 37.

ke putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta membatalkan surat keputusan Menkumham atas kepengurusan Golkar versi Munas Jakarta yang dipimpin oleh Agung Laksono.

Ketika upaya penyelesaian konflik melalui Mahkamah Partai maupun hukum tidak berhasil, elit Partai Golkar kemudian mengupayakan satu upaya terakhir yaitu melalui jalur politik. Jalur politik yang dimaksud adalah dengan menginstitusionalisasi upaya konsensus politik. Upaya konsensus politik yang pertama dilakukan dengan pertemuan jelang Pilkada Serentak 2015 yang menjadi awal mula pertemuan elit Partai Golkar yang berkonflik. Keterlibatan pihak luar, yaitu Jusuf Kalla dalam konsensus Partai Golkar nampak saat rencana Partai Golkar ikut dalam Pilkada pada Juli 2015. Akibat konflik internal, Partai Golkar tidak bisa memasukkan nama calonnya pada Pilkada Serentak 2015. Jusuf Kalla kemudian mengusulkan agar bisa ikut Pilkada 2015, Partai Golkar ditandatangani kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.⁴³ Jusuf Kalla bahkan sudah melobi KPU agar Golkar bisa ikut Pilkada dengan syarat calon yang diajukan mendapat tanda tangan kedua belah pihak bersengketa. Namun usulan tersebut ditolak KPU, karena tidak punya landasan UU.⁴⁴

Jelang Pilkada Serentak 2015, kedua faksi dipertemukan melalui Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Golkar pada 1 November 2015, Silatnas juga dihadiri para politisi senior Partai Golkar, seperti Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, dan BJ Habibie. Meski demikian, hasil dari Silatnas tersebut belum mampu menyelesaikan konflik, karena kedua pihak masih membahas Putusan Kasasi MA yang meminta Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut SK Pengesahan Kepengurusan Hasil Munas Ancol 2015, dibawah Agung Laksono.⁴⁵

⁴³ Gatta Dewabrata, "In Photos: Islah Partai Golkar", <http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/94807-in-photos-islah-partai-golkar>, diakses pada tanggal 7 April 2017.

⁴⁴ Yusro M. Santoso, "JK Pun Melobi Agar Golkar Bisa Ikt Pilkada", <https://beritagar.id/artikel/arena/index.php/artikel/berita/jk-pun-melobi-agar-golkar-bisa-ikut-pilkada-23186> diakses pada 9 Mei 2017.

⁴⁵ Prima Gumilang, "Silatnas Golkar untuk Rekonsiliasi Hadapi Pilkada Serentak" <http://www.cnnindonesia.com/politik/20151031192444-32-88619/silatnas-golkar-untuk-rekonsiliasi-hadapi-pilkada-serentak/>, diakses pada 8 April 2017.

Selepas Silatnas, kedua pihak mulai membangun jalur komunikasi informal, namun belum terdapat kesepakatan, seperti pada 2 November 2015. Pada saat itu utusan Aburizal Bakrie telah menghubungi Agung Laksono yang menawarkan dua poin kesepakatan yaitu Agung Laksono harus mengakui Munas Bali sebagai Munas yang sah. Kedua, Aburizal Bakrie enggan menyelenggarakan Munas Golkar dalam rangka penyelesaian masalah. Dua syarat tersebut ditolak oleh pihak Agung Laksono, sehingga belum terdapat kesepakatan.⁴⁶ Menanggapi sikap pihak Agung Laksono tersebut, pihak Aburizal Bakrie berusaha melakukan lobi dengan mempertimbangkan posisi terhormat bagi Agung Laksono dalam kepengurusan Partai Golkar.⁴⁷ Namun, hal tersebut ditolak oleh pihak Agung Laksono yang diwakili oleh Dave Laksono. Dave mengatakan Agung meminta agar Munas dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah konflik partai.⁴⁸

Menurut Indra J. Piliang, Silatnas dalam rangka menunjukkan pada pihak luar bahwa kedua belah pihak sudah konsensus. Untuk menunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti Presiden dan partai-partai lainnya. Selain itu, Golkar ingin membuat *image* baik di hadapan pihak luar. Sehingga di tengah masyarakat ada pemikiran jika cara politik Partai Golkar cukup baik, membuat partai tidak pecah dan konflik selesai. Hal ini dalam rangka mendapatkan dukungan kembali dari masyarakat.⁴⁹

Macetnya komunikasi antara kedua pihak yang berkonflik membuat para elit Partai Golkar membentuk lembaga yang menjadi bangunan

⁴⁶ Bilal Ramadhan, "Kubu Agung: Pertemuan Kedua Gagal Gara-Gara Tawaran Ical" <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/11/03/nx8aoq330-kubu-agung-pertemuan-kedua-gagal-garagara-tawaran-ical>, diakses pada 7 Maret 2017.

⁴⁷ Bilal Ramadhan, "Ical akan Sediakan Posisi Terhormat untuk Agung Laksono", <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/11/09/nxjgk6330-ical-akan-sediakan-posisi-terhormat-untuk-agung-laksono>, diakses pada 7 Maret 2017.

⁴⁸ Bilal Ramadhan, "Kubu Agung Syaratkan Munas untuk Rekonsiliasi", <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/11/09/nxjswu330-kubu-agung-syaratkan-munas-untuk-rekonsiliasi>, diakses pada 7 Maret 2017.

⁴⁹ Wawancara terhadap Indra J. Piliang pada 24 Maret 2018, di Jakarta.

menuju konsensus Partai Golkar yaitu Tim Transisi Partai Golkar. Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Ketua Tim Transisi Partai Golkar pada Januari 2017. Anggota lainnya adalah BJ Habibie (Presiden RI ke-3), Ginanjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul Latief, Siswono Yudohusodo, Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, HR Agung Laksono, Theo L. Sambuaga, dan Soemarsono. Tim ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik Partai Golkar dan mempersiapkan Munas Partai Golkar selambat-lambatnya bulan Maret 2016.⁵⁰

Tim transisi bertugas menetapkan kepesertaan Munas, Panitia Penyelenggara Munas (SC dan OC), tanggal dan tempat penyelenggaraan Munas, serta aturan dan ketentuan yang menjamin terlaksananya Munas yang aspiratif, demokratis, terbuka dan akuntabel. Tim transisi juga diberi tugas untuk menata kepengurusan dan susunan fraksi MPR dan DPR RI selama masa transisi. Sesuai dengan putusan pertama Partai Golkar, tim transisi harus menjamin, menghindarkan prinsip *“the winner takes all”*, mengapresiasi kepengurusan yang melibatkan pihak-pihak yang berselisih, merehabilitasi individu pengurus Partai Golkar yang dipecat selama perselisihan terjadi, serta memberikan larangan untuk membentuk partai politik baru.⁵¹

Upaya konsensus politik Partai Golkar selanjutnya terjadi pada Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar pada 23-25 Januari 2016. Panitia Rapimnas berasal dari dua kubu yang terlibat konflik, dengan ketua panitia Nurdin Halid dari kubu Aburizal Bakrie, sementara dari kubu Agung Laksono ditempatkan Yorrys Raweyai sebagai Wakil Ketua penyelenggara.⁵² Rapimnas memiliki nilai penting karena dihadiri oleh petinggi pemerintahan seperti Wakil

Presiden Jusuf Kalla, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.⁵³ Kehadiran para petinggi pemerintahan menunjukkan pentingnya Rapimnas Partai Golkar bagi pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hasil Rapimnas antara lain; (1) penyelenggaraan Munaslub waktunya diserahkan kepada Ketua Umum, dan (2) pembaharuan pola hubungan Golkar dengan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.⁵⁴

Indra J. Piliang beranggapan bahwa Munaslub Partai Golkar merupakan bentuk penyelesaian konflik yang final. Sebelum Rapimnas, Aburizal Bakrie memiliki posisi sebagai oposisi, sehingga berlawanan antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono. Namun karena pengaruh Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie berkoalisi dengan pemerintah. Poros Muda Partai Golkar juga mendukung pemerintah.⁵⁵

Upaya konsensus terakhir Partai Golkar terjadi pada Munas Luar Biasa Partai Golkar bulan Mei 2016. Panitia Munaslub mengambil peserta dari kepengurusan DPD I dan DPD II hasil Munas Riau. Munas Partai Golkar tahun 2016, tidak memunculkan lagi nama Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie, kedua tokoh tersebut digantikan oleh Setya Novanto yang saat itu berposisi sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI. Setya Novanto harus bersaing dengan Ade Komarudin, sebelum akhirnya Akom mengundurkan diri dari calon ketua umum.⁵⁶

Pada penyelenggaraan Munaslub, Setya Novanto terpilih menjadi Ketua Umum Partai

⁵⁰ Nur Aini, “JK Tegaskan Pembentukan Tim Transisi Bukan Untuk Kuasai Golkar” <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/01/17/o12t0h382-jk-tegaskan-pembentukan-tim-transisi-bukan-untuk-kuasai-golkar>, diakses pada 7 Maret 2018.

⁵¹ Ahmad Toriq, “Ini Putusan Lengkap Mahkamah Partai Golkar Soal Pembentukan Tim Transisi” <http://news.detik.com/berita/3120950/ini-putusan-lengkap-mahkamah-partai-golkar-soal-pembentukan-tim-transisi>, diakses pada 22 Mei 2017.

⁵² Indah Mutiara Kamil, “Ini Susunan Panitia Rapimnas Golkar 23 Januari, Ada Nama Kubu Agung”, <https://news.detik.com/berita/3124865/ini-susunan-panitia-rapimnas-golkar-23-januari-ada-nama-kubu-agung>, diakses pada 22 Oktober 2017.

⁵³ “Absen di Pembukaan, Jusuf Kalla Hadir di Penutupan Rapimnas Partai Golkar” <https://nasional.tempo.co/read/739220/absen-di-pembukaan-jk-hadir-di-penutupan-rapimnas-golkar>, diakses pada 12 Oktober 2017.

⁵⁴ “Prahara Partai Golkar: Ini Hasil Keputusan Rapimnas Golkar” <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/25/ini-hasil-keputusan-rapimnas-golkar>, diakses pada 16 Oktober 2017.

⁵⁵ Wawancara terhadap Indra J. Piliang pada 24 Maret 2018, di Jakarta.

⁵⁶ Taufik Rachman, “Akom Tak Lanjutkan Voting Putaran Kedua, Demi Rekonsiliasi Golkar”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/05/17/o7ate1219-akom-tak-lanjutkan-voting-putaran-kedua-demi-rekonsiliasi-golkar>, diakses pada 9 Maret 2017.

Golkar. Saat menjabat, Setya Novanto langsung memposisikan Partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintahan Joko Widodo.⁵⁷ Disamping itu, Setya Novanto segera mengkonsolidasikan DPD tingkat I dan tingkat II.

Selain itu, Pimpinan Partai Golkar yang baru juga melakukan perubahan di Fraksi Golkar DPR RI. Tidak seperti sebelumnya dimana pihak yang kalah disingkirkan, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI diisi oleh Setya Novanto (yang berasal dari kubu Aburizal Bakrie) dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar diisi oleh Agus Gumiwang Kartasmita (yang berasal dari kubu Agung Laksono). Sementara alat kelengkapan dewan DPR RI, juga dilakukan perubahan namun dalam rangka memenuhi konsensus yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkonflik.

DPD tingkat I dan tingkat II yang terdampak konflik dari Pusat, juga ditata ulang oleh pimpinan Partai Golkar yang baru. Pada setiap DPD tingkat I dan tingkat II dilakukan musyawarah untuk memilih pimpinan DPD Partai Golkar dalam rangka menyatukan dua kepengurusan di daerah. Sebagai contoh, dualisme kepemimpinan Partai Golkar di DPD tingkat I Riau. Pengurus Golkar Riau melakukan konsolidasi pengurus partai, anggota legislatif Partai Golkar Riau, dan seluruh pengurus DPD II Partai Golkar Riau melalui Musyawarah Daerah Partai Golkar Riau.⁵⁸

Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, masing-masing diberikan posisi pada kepengurusan Partai Golkar, khusus bagi Aburizal Bakrie diberikan posisi sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar yang sebelumnya diduduki oleh Mantan Presiden Soeharto, dan setelah posisi tersebut sempat ditiadakan. Sedangkan Agung Laksono diberikan posisi sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.⁵⁹

⁵⁷ Riva Dessthania Suasstha, "Setya Ungkap Alasan Golkar Dukung Pemerintah", <http://www.cnnindonesia.com/politik/20160619180310-32-139311/setya-ungkap-alasan-golkar-dukung-pemerintah/> diakses pada 11 April 2017.

⁵⁸ Friscilia, "Dinamika Konflik Partai Golongan Karya..", hlm. 9.

⁵⁹ Ihsanudin, "Aburizal Bakrie Ditetapkan Sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar", <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/16/20105881/Aburizal.Bakrie.Ditetapkan.Jadi.Ketua.Dewan.Pertimbangan.Golkar> diakses pada 10 Maret 2017.

Penutup

Dalam sejarah Partai Golkar Era Reformasi – Pasca era Suharto – dimulai ketika Akbar Tandjung vs Wiranto dalam Konvensi Calon Presiden dari Golkar, konsensus Partai Politik sangat jarang terjadi. Hampir pada setiap pergantian kepemimpinan Partai Golkar memunculkan satu partai baru. Hal inilah yang terjadi pada Partai Golkar pada periode pasca-reformasi. Beberapa partai politik didirikan usai salah satu pihak kalah dalam pemilihan Partai Golkar, diantaranya Partai Nasdem, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sementara pada konsensus Partai Golkar, terjadi suatu kesepakatan yang tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga menyebabkan Partai Golkar bergabung dengan koalisi sebagai partai pendukung pemerintah.

Keberhasilan Partai Golkar dalam mencapai konsensus partai politik disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor pertama adalah faktor internal, yakni konsensus Partai Golkar. Konsensus Partai Golkar disebabkan oleh konflik yang terlalu lama. Selain itu konflik menyebabkan kerusakan yang besar pada partai. Hal ini sesuai dengan pendapat John Higley bahwa pemersatu elit Partai Golkar yaitu *consensual elite* di mana elit-elit partai saling mengunci jaringan satu sama lain, sehingga tidak tercapai titik temu kepentingan dari kedua pihak yang berkonflik. Untuk itu diperlukan mediator yang dapat memediasi kepentingan kedua belah pihak.

Sementara faktor eksternal konsensus Partai Golkar disebabkan adanya kepentingan kelompok-kelompok eksternal, khususnya pemerintah, yang diwakili oleh Muhammad Jusuf Kalla (Wakil Presiden), Luhut Binsar Pandjaitan (Menkopolkam), dan Yasonna Laoly (Menkumham). Jusuf Kalla maupun Luhut Binsar Pandjaitan mengakui jika pihaknya tidak menginginkan Partai Golkar terpecah, dan adanya kepentingan sebagai kader Partai Golkar. Sementara itu, terdapat kepentingan bagi Partai Golkar untuk bergabung sebagai partai pendukung pemerintah, dimana popularitas Partai Golkar dapat terangkat.

Pemerintah sebagai penguasa politik mempunyai peranan dalam pelaksanaan pengelolaan konflik (*conflict management*). Terdapat kepentingan pihak pemerintah dalam rangka menjaga konflik Golkar tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

Sementara proses konsensus Partai Golkar dilakukan melalui tiga tahap, yaitu melalui tahapan AD/ART Partai Golkar atau Mahkamah Partai Golkar. Namun, Mahkamah Partai tidak menyelesaikan permasalahan konflik Partai Golkar. Kemudian tahap kedua, yaitu melalui jalur hukum yang membawa kedua belah pihak hingga ke Mahkamah Agung. Konflik justru semakin meruncing. Penyelesaian terakhir adalah melalui jalur politik.

Penyelesaian melalui jalur politik dilakukan dengan pembentukan Tim 10 yang didirikan sebelum Pilkada 2015. Selanjutnya dilakukan Silaturahmi Nasional Partai Golkar, dan dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan Partai Golkar tahun 2016, serta diakhiri dengan diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016. Munaslub ini menghasilkan terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, pencabutan dukungan terhadap Koalisi Merah Putih (KMP), pencabutan sanksi terhadap Kader Partai Golkar, dan pengesahan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

Melihat keberhasilan konsensus Partai Golkar, tidak dipungkiri jika keberhasilan ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu keberhasilan konsensus disebabkan adanya mekanisme internal penyatuan suara partai melalui rangkaian Rapimnas, maupun Munaslub. Adanya kelembagaan internal akan menjadi sarana konsensus elit partai politik, sementara faktor eksternal harus mendukung terselenggaranya konsensus Partai Politik.

Daftar Pustaka

Buku

Akbar Hairi, Muhammad Imam. 2012. *Demokrasi Internal Partai: Studi Proses Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Golkar Tahun 1998, 2004 dan 2009*. Depok: Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Busairi, Ach. 2016. *Dualisme Kepemimpinan Dalam Partai Golkar*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Byrman, Alan. 1988. *Quantity and Quality in Social Research*. Boston: Unwin Hyman.

Hellmann, Oliver. 2009. *Political Party Organisation in East Asia: Towards a new Framework for the Analysis of Party Formation and Change*. Tesis. Birmingham: The University of Birmingham.

Higley, John. 2006. *Elite Foundations of Liberal Democracy*. New York: Rowman and Littlefield Publisher.

Lewis, Paul G. 2000. *Political Parties in Post-Communist Eastern Europe*. New York: Routledge.

Rauf, Maswadi. 2000. *Konsensus Politik: Sebuah Pejajagan Teoritis*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Tarigan, Yosssi Hagaita. 2016. *Lemahnya Pelem-bagaan Mengakibatkan Konflik Partai Golkar Pada November 2014-Januari 2016: Studi Kasus Munas Bali dan Munas Ancol*, Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Yuliani, Leni. 2015. *Sikap Elite Partai Golongan Karya Terhadap Konflik Internal Partai Golongan Karya (Studi Pada DPD I Provinsi Lampung)*, Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.

Jurnal

Kamarudin, "Konflik Internal Partai Politik: Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa" yang bersumber dari Jurnal EJournal LIPI, yang bersumber dari situs <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/216/92>

Frisilia, Maya. 2017. "Dinamika Konflik Partai Golongan Karya Tahun 2013-2015 di Provinsi Riau" dalam Jurnal *JOM FISIP Universitas Riau*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2017.

Rijal, Muhammad Hasan Saeful dan Wawan Ichwanuddin, "Dinamika Politik Internal Partai Golkar pada Masa Kepemimpinan Jusuf Kalla 2004-2009", Artikel, dalam situs <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S47240-M%20Hasan%20Saeful%20Rijal>

Sanur L, Debora. "Manajemen Konflik Partai Politik", dalam *Jurnal Info Singkat Dewan Perwakilan Rakyat*, Vol. VII, No. 071/I/P3DI/April/2015

Setyawati, Endang. 2012. "Pengusaha Media dan Kepemimpinan Partai Politik: Studi Kasus Hary Tanoesoedibjo sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat" yang bersumber dari e-Journal Universitas Airlangga <http://>

Sumber Internet

- Gatta Dewabrata, "In Photos: Islah Partai Golkar" <http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/94807-in-photos-islah-partai-golkar>.
- Nur Aini, "JK Tegaskan Pembentukan Tim Transisi Bukan Untuk Kuasai Golkar" <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/01/17/o12t0h382-jk-tegaskan-pembentukan-tim-transisi-bukan-untuk-kuasai-golkar>.
- Bilal Ramadhan, "Kubu Agung Syaratkan Munas untuk Rekonsiliasi". <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/11/09/nxjswu330-kubu-agung-syaratkan-munas-untuk-rekonsiliasi>
- Indra J. Piliang, "Kronologi Perang Beringin", <https://www.selasar.com/jurnal/5583/Kronologi-Perang-Beringin>.
- M. Toto Suryaningtyas, "Merunut Sejarah Konflik Partai Golkar", <http://print.kompas.com/baca/2016/01/13/Merunut-Sejarah-Konflik-Partai-Golkar>.
- Prima Gumilang, "Silatnas Golkar untuk Rekonsiliasi Hadapi Pilkada Serentak" <http://www.cnnindonesia.com/politik/20151031192444-32-88619/silatnas-golkar-untuk-rekonsiliasi-hadapi-pilkada-serentak/>
- Pusat Data Republika, "Jejak Pertarungan Internal Golkar" <http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/15/05/11/no65w612-jejak-pertarungan-internal-golkar>
- RivaDessthania Suastha, "Setya Ungkap Alasan Golkar Dukung Pemerintah", <http://www.cnnindonesia.com/politik/20160619180310-32-139311/setya-ungkap-alasan-golkar-dukung-pemerintah/>
- Suriyanto, "Dualisme Fraksi Golkar Ganggu Koordinasi di DPR" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141211094642-32-17429/dualisme-fraksi-golkar-ganggu-koordinasi-di-dpr/>

Yusro M. Santoso, "JK Pun Melobi Agar Golkar Bisa Ikut Pilkada" <https://beritagar.id/artikel/arena/index.php/artikel/berita/jk-pun-melobi-agar-golkar-bisa-ikut-pilkada-23186>

- "Absen di Pembukaan, Jusuf Kalla Hadir di Penutupan Rapimnas Partai Golkar" <https://nasional.tempo.co/read/739220/absen-di-pembukaan-jk-hadir-di-penutupan-rapimnas-golkar>
- "Alasan Menkumham Perpanjang SK Golkar Munas Riau" <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56a9f14abfb91/ini-alasan-menkumham-perpanjang-sk-golkar-munas-riau>
- "Bareskrim Menindaklanjuti Laporan Agung Laksono atas Perebutan Ruang Fraksi Golkar" <http://print.kompas.com/baca/2015/04/11/Bareskrim-Proses-Laporan-Kubu-Agung>.
- "Hasil Verifikasi Rotasi AKD ke-27 Anggota Golkar Pro Agung Laksono" <http://wikidpr.org/news/wikidpr-hasil-verifikasi-ke-komisi-apa-saja-27-anggota-golkar-pro-agung-laksono-dirota>.
- "Pekerjaan DPR Menumpuk, Konflik Golkar Harus Segera Diselesaikan" <http://news.detik.com/berita/2875344/pekerjaan-dpr-menumpuk-konflik-golkar-harus-segera-diselesaikan>.

Wawancara

- Wawancara dengan Muhammad Jusuf Kalla pada 24 Maret 2018
- Wawancara dengan Indra J. Piliang pada 24 Maret 2018
- Wawancara dengan Luhut Binsar Pandjaitan pada 22 Maret 2018

TENTANG PENULIS

Indriana Kartini

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak 2003 hingga saat ini. menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 2002. Gelar Master of International Politics diraih dari the University of Melbourne, Australia pada tahun 2008. Saat ini penulis tergabung dalam Tim Penelitian Perbatasan P2 Politik LIPI. Penulis dapat dihubungi melalui email: indriana.kartini@gmail.com

Meutya Viada Hafid

Penulis merupakan anggota DPR RI dari fraksi Golkar sejak 2009 hingga kini. Lahir di Bandung pada 3 Mei 1978 dan memulai karirnya sebagai jurnalis di Metro TV. Penulis menyelesaikan pendidikan pasca Sarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia. adapun penulis dapat dihubungi melalui email: meutyahafidinfo@gmail.com

Arif Novianto

Penulis merupakan Asisten peneliti di Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Peneliti di Pusat Studi Jerman UGM pada tahun 2015. Penulis dapat dihubungi melalui email: arif.novianto@mail.ugm.ac.id

Lukman Kurniawan

Penulis merupakan Alumnus Departemen Sosiologi FISIPOL UGM dan Peneliti di Pusat Studi Jerman pada tahun 2015.

Samodra Wibawa

Penulis merupakan Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM dan Peneliti di Pusat Studi Jerman.

Siswanto

Penulis merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia. Tergabung dalam tim penelitian Politik Luar Negeri, penulis sudah banyak menghasilkan karya-karya baik buku maupun jurnal. Adapun penulis dapat dihubungi melalui email: sish_jakarta@yahoo.com

Awani Irewati

Penulis merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bidang kajiannya adalah perbatasan. Sudah banyak karya berupa buku maupun jurnal yang ditulis oleh beliau. Adapun penulis dapat dihubungi melalui email: irewati62@gmail.com

M. Fakhry Ghafur

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang tergabung dalam tim penelitian Agama dan Politik. Bidang kajiannya meliputi Timur Tengah dan negara Islam lainnya. Penulis dapat dihubungi di email: fachryghafur@gmail.com

Nyimas Latifah Letty Aziz

Penulis merupakan peneliti madya di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Fokus kajiannya adalah Otonomi dan Pemerintahan Daerah. Saat ini penulis tergabung dalam tim penelitian Otonomi Daerah. Penulis dapat dihubungi melalui email: nyimas.letty@gmail.com; nyimas.letty@yahoo.com

Defbry Margiansyah

Penulis merupakan kandidat peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI. Ia merupakan Alumnus *Global Studies Programme Institut für Soziologie, Albert-Ludwig-Universität Freiburg*, Jerman. Penulis dapat dihubungi melalui email: defbry@yahoo.com

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

